

PROBLEMATIK PEMBELAJARAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI INKLUSIF

*Muhammad Azimi, Ali Rachman, dan Mirnawati**

*Program Studi Pendidikan Khusus/ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
[*Mirnawati.plb@ulm.ac.id](mailto:Mirnawati.plb@ulm.ac.id)*

Abstract. *One form of handling needed by children with special needs is educational services. Inclusive education is a system that complements the previous ABK education system. However, the implementation of inclusive education in higher education has just taken place, namely in 2017. Since that year, Lambung Mangkurat University has also organized inclusive education. Several previous studies have shown that learning in inclusive education in Indonesia still has problems. This study intends to reveal the problems with the learning of students with special needs in the Special Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Lambung Mangkurat University. This study uses a qualitative research approach. The data sources in this study amounted to 23 people, which were divided into five students with special needs in the Special Education Study Program, ten volunteers accompanying MBK from the Disability Service Unit, and eight lecturers from the Special Education Study Program. Data collection techniques in this study were used to interview and documentation techniques. Analysis of the data used in this study is the analysis model of Miles and Huberman. This study describes that there are still various problems in the learning of students with special needs. The problem with planning is that the MBK assessment carried out so far is not comprehensive, and the RPS for students with special needs is not modified. At the implementation stage, problems that arise, namely the implementation of MBK learning is not following the prepared RPS, MBK is learning that is not modified, another problem is the ability of the MBK companion volunteer that is not optimal, MBK is learning that does not apply inclusive settings, and learning media are still not fully available. At the evaluation stage, there are problems, including the evaluation of MBK learning that is not modified and the evaluation of MBK learning that is still not running.*

Keywords: *Higher education; MBK learning; Problematic*


Abstrak. Salah satu bentuk penanganan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem penyempurna dari sistem pendidikan ABK sebelumnya. Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif di perguruan tinggi baru-baru saja berlangsung, yaitu tahun 2017. Sejak tahun itu pula, Universitas Lambung Mangkurat turut menyelenggarakan pendidikan inklusif. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran dalam pendidikan inklusif di Indonesia masih memiliki permasalahan. Penelitian ini bermaksud mengungkap apa saja problematik pada pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus di Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang terbagi menjadi 5 orang mahasiswa berkebutuhan khusus Prodi Pendidikan Khusus, 10 orang volunteer pendamping MBK dari Unit Layanan Disabilitas, dan 8 orang dosen Prodi Pendidikan Khusus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa masih terdapat berbagai problematik dalam pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus. Problematic pada

perencanaan, yaitu asesmen MBK yang dilaksanakan selama ini tidak komprehensif dan RPS mahasiswa berkebutuhan khusus yang tidak dimodifikasi. Pada tahap pelaksanaan, problematik yang muncul, yaitu pelaksanaan pembelajaran MBK tidak sesuai dengan RPS yang disusun, ada pembelajaran MBK yang tidak dimodifikasi, problematik lainnya adalah kemampuan volunter pendamping MBK yang belum optimal, ada pembelajaran MBK yang tidak menerapkan setting inklusif, serta media pembelajaran masih belum tersedia secara lengkap. Pada tahap evaluasi, terdapat problematik, di antaranya evaluasi pembelajaran MBK yang tidak dimodifikasi dan evaluasi pembelajaran MBK masih belum berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci: Problematik; Pembelajaran MBK; Perguruan tinggi

© 2020 Vidya Karya

DOI : <https://doi.org/10.20527/jvk.v35i2.10321>

Artikel ini di bawah lisensi CC-BY-SA 

PENDAHULUAN

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan-perbedaan baik intraindividual maupun inter individual yang signifikan, sehingga mutlak membutuhkan layanan khusus berupa pendidikan dan pengajaran khusus untuk mengembangkan potensinya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pembelajaran, komunikasi-interaksi dengan lingkungan, dan lain-lain (Yuwono & Utomo, 2015). Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang memiliki sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya, ataupun memiliki perbedaan dengan anak padal umumnya atau dari rata-rata anak seusianya (Kustawan & Meimulyani, 2016). Menurut Heward (Kustawan & Meimulyani, 2016), anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi tidak selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Karakteristik tiap anak berkebutuhan khusus tergantung hambatan yang disandang, sehingga penanganan dan layanannya pun harus disesuaikan dengan hambatan yang dimiliki.

Secara garis besar, anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi

dua, yaitu anak berkebutuhan khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen. Anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak berkebutuhan khusus yang memperoleh hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang biasanya penyebabnya berasal dari luar dirinya, seperti anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak dari masyarakat yang terasingkan, dan sebagainya (Kustawan, 2012). Anak berkebutuhan khusus temporer memiliki hambatan yang cenderung tidak permanen atau sementara. Contoh lainnya, yaitu anak yang trauma akibat bencana alam atau kerusuhan, anak yang mengalami kesulitan konsentrasi, anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti anak yang bermasalah dalam konsentrasi karena sering diperlakukan dengan kasar atau anak yang tidak bisa membaca karena kekeliruan guru dalam mengajar. Anak-anak ini tentu memiliki hambatan dalam belajar, sehingga membutuhkan pelayanan khusus (Kustawan & Meimulyani, 2016).

Sebaliknya, menurut Kustawan & Meimulyani (2016), anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen atau tidak sementara, sehingga memerlukan perhatian dan

pelayanan khusus berdasarkan hambatan yang dimiliki. Anak berkebutuhan khusus permanen terdiri dari beberapa jenis, yaitu anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras, anak dengan *autism spectrum disorder* (gangguan spektrum autisme), anak dengan *specific learning disability* (kesulitan belajar spesifik), anak *slow learner* (lamban belajar), anak dengan *attention deficit disorder (ADD)*, anak dengan *attention deficit and hyperactivity disorder* (gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas), dan anak *gifted-talented* (cerdas istimewa berbakat istimewa).

Melihat dari banyaknya jenis anak berkebutuhan khusus tersebut, tentu mereka memiliki hambatannya masing-masing mulai dari melakukan mobilitas sehari-hari hingga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, anak-anak ini membutuhkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, salah satunya adalah penanganan dalam hal layanan pendidikan khusus, seperti yang dikemukakan oleh Kustawan & Meimulayni (2016) bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barrier to learning and development*), sehingga memerlukan layanan pendidikan yang spesifik dan berbeda dengan anak-anak pada umumnya.

Menurut Kemenristekdikti (2017), selain sebagai salah satu bentuk penanganan, pendidikan juga merupakan hak bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebagai warga negara, seperti yang tercantum pada Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang-undang tersebut juga

menjelaskan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan/atau lembaga pendidikan umum (inklusif).

Sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan luar biasa yang berkembang telah merumuskan berbagai sistem pendidikan, di antaranya pendidikan segregatif, integratif, dan inklusif (Sumarni, 2013). Sistem pendidikan segregatif merupakan sistem pendidikan terpisah, yang diimplementasikan pada kelas mandiri dan diisi oleh peserta didik yang memiliki kecacatan tertentu (Dixon, 2005). Sistem pendidikan integratif atau dikenal dengan pendekatan terpadu merupakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan anak luar biasa untuk bisa masuk ke sekolah reguler, tetapi masih terbatas pada anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum di sekolah tersebut.

Sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Pasal 1 Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Pendidikan inklusif menurut Yuwono & Utomo (2015), juga dapat didefinisikan sebagai *education for all* (pendidikan untuk semua).

Pendidikan inklusif terkesan menjadi penyempurnaan dan alternatif pendidikan yang lebih tidak mengekang atau lebih fleksibel bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Darma & Rusyidi (Darma & Rusyidi, 2015) sekolah luar biasa (SLB) masih menjadi

tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya yang menghambat proses interaksi di antara mereka yang mengakibatkan anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak berkebutuhan khusus, begitu pun sebaliknya, anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Sebelum tahun 2017, pendidikan inklusif hanya berlangsung hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat saja. Namun, semenjak tahun 2017, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menerbitkan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi yang menegaskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di pendidikan tinggi. Sebelumnya, memang sudah ada beberapa regulasi yang juga menyerukan pendidikan inklusif di perguruan tinggi, seperti Pasal 37 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, regulasi-regulasi tersebut tidak terlalu menjelaskan mengenai layanan dan panduan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di pendidikan tinggi, tetapi hanya tentang persiapan, pembentukan, penyediaan fasilitas, dan tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Permenristekdikti Nomor 46/2017 ini menjadi penyempurna yang mempertegas penyelenggaraan pendidikan inklusif di pendidikan tinggi yang juga menjadi regulasi yang sangat penting bagi dunia pendidikan tinggi karena saat ini semakin banyak warga negara penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pada tahun tersebut, data yang

masuk ke Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti, tercatat ada 40 mahasiswa penyandang disabilitas dari 152 perguruan tinggi yang telah melaporkan. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) yang tersebar di berbagai program studi (Kemenristekdikti, 2017).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di perguruan tinggi juga merambat ke salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, yaitu Universitas Lambung Mangkurat yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin yang sudah mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2017. Pada tahun 2017, ada 8 orang mahasiswa berkebutuhan khusus yang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini berlanjut dengan diterimanya 2 orang mahasiswa berkebutuhan khusus pada tahun 2018 dan 10 orang mahasiswa berkebutuhan khusus pada tahun 2019 (Data ULD Universitas Lambung Mangkurat).

Menurut Sudjak (2018), sekalipun perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia saat ini semakin diterima dan berkembang cukup pesat, dalam tataran implementasinya masih terdapat problem, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak. Begitu pula dengan seiring berjalannya proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Lambung Mangkurat, tidak dapat dielakkan bahwa akan ada permasalahan atau problematik yang muncul. Hal ini wajar karena penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dibidang masih baru. Permasalahan ini pun tidak akan dapat diselesaikan apabila belum ada identifikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apa saja problematik yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas

Lambung Mangkurat yang dapat dimulai dari proses pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif yang bertujuan menjelaskan deskripsi atau gambaran mengenai suatu kondisi atau peristiwa secara objektif. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap problematik pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Lambung Mangkurat.

Penelitian ini dilakukan secara daring dan luring. Penelitian secara luring dilaksanakan di salah satu rumah subjek dan Program Studi Pendidikan Khusus. Sumber data primer pada penelitian ini, yaitu mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat tahun ajaran 2019/2020, dosen yang terlibat dalam pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus, dan volunteer dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Universitas Lambung Mangkurat. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen yang berisi jumlah serta biodata Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (MBK) berdasarkan data dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Universitas Lambung Mangkurat.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan pengecekan anggota (*member check*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematik pada Tahap Perencanaan Pembelajaran

Problematik pada tahap perencanaan pembelajaran MBK di Program Studi

Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, di antaranya sebagai berikut. 1) Asesmen MBK yang dilaksanakan selama ini tidak komprehensif. 2) RPS mahasiswa berkebutuhan khusus tidak dimodifikasi.

Pada tahap perencanaan pembelajaran, asesmen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah hal yang sangat penting. Asesmen digunakan untuk mengetahui kebutuhan MBK sehingga dapat ditentukan program yang sesuai untuknya, sebagaimana dikemukakan oleh Yuwono (2015) bahwa asesmen merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk diketahui kelemahan dan kekuatan orang yang dilakukan asesmen, hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan sebagai dasar dalam menyusun rancangan pembelajaran.

Begitu pula dengan RPS sebagaimana menurut ayat 1 & 2 pasal 12 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bahwa perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Pada setting inklusif, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik (Pasal 7 & 8 Permendikbud No. 70 Tahun 2009). Hal ini berarti perencanaan pembelajaran atau perancangan RPS menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Oleh karena itu, ketika asesmen tidak dijalankan, atau asesmen yang dijalankan masih belum tepat sasaran, misalnya tidak komprehensif dan instrumen yang digunakan kurang memadai untuk MBK yang akan kuliah, maka perencanaan pembelajaran pun menjadi bermasalah.

Begitu pula dengan modifikasi RPS. Merujuk pada fungsi RPS sebagai acuan keseluruhan pembelajaran, maka seharusnya modifikasi pun tertuang di dalamnya. Ketika RPS yang digunakan pada pembelajaran MBK tidak terdapat modifikasi, maka perencanaan pembelajaran MBK pun juga menjadi bermasalah. RPS setidaknya memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah semester, sks, serta nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta daftar referensi yang digunakan (Kemenristekdikti, 2017).

2. Problematik Pada Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

Problematik tahap pelaksanaan pembelajaran MBK di Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pembelajaran MBK tidak sesuai dengan RPS yang disusun. 2) Kemampuan volunteer pendamping MBK yang belum optimal. 3) Ada pembelajaran MBK yang tidak menerapkan setting inklusif. 4) Media pembelajaran masih belum tersedia secara lengkap.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap kedua setelah perencanaan sekaligus tahap utama dalam sebuah proses pembelajaran, sebagaimana dikemukakan oleh Majid (2013), pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan belajar-mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun pada perencanaan sebelumnya.

Pada tahap ini, informasi yang diperoleh juga berasal dari 3 sudut pandang, yaitu mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK), volunteer pendamping, dan dosen. Tahap pelaksanaan pada pembelajaran inklusif memuat beberapa hal sesuai dengan karakteristik MBK, yang dapat dikerucutkan menjadi: pendampingan, media pembelajaran, setting ruang kelas inklusif, penyampaian materi, serta interaksi sosial warga kelas inklusif (Soeparman, 2017).

Pendampingan merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan perkuliahan di kelas inklusif yang tersirat dari pernyataan Soeparman (2017), yaitu pendamping (termasuk juru bahasa isyarat untuk mahasiswa Tuli) selalu dibutuhkan pada mahasiswa dengan hambatan tunanetra, tunarungu/Tuli, tunadaksa, dan autisme. Peran volunteer pendamping sangat penting dalam membantu mahasiswa berkebutuhan khusus mengatasi keterbatasannya ketika mengikuti kuliah di kelas dan kegiatan akademik lain (Soeparman, 2017). Ketika MBK tidak didampingi oleh pendamping dengan alasan lapa pun (tidak hadir atau tidak tersedia), maka pelaksanaan pembelajaran pun menjadi bermasalah.

Begitu pula dari segi media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran MBK. Hal ini sebagaimana yang tersirat dari

pernyataan Soeparman (2017) bahwa setiap MBK membutuhkan media pembelajaran yang berbeda-beda, seperti mahasiswa tunanetra membutuhkan media audio dan deskripsi lisan; mahasiswa tunarungu/Tuli membutuhkan media Power Point dan alat ilustrasi visual; serta mahasiswa tunadaksa membutuhkan media berupa alat bantu berjalan maupun berpijak, seperti kursi roda. Ketika media pembelajaran tersebut tidak tersedia, maka pelaksanaan pembelajaran pun menjadi bermasalah selama MBK benar-benar membutuhkannya.

Setting ruang inklusif harus benar-benar diakomodasi juga. Hal ini karena *setting* tersebut termasuk dalam hal yang menunjang pelaksanaan pembelajaran MBK. *Setting* tersebut di antaranya penempatan posisi duduk di depan untuk MBK, tempat khusus untuk kursi roda (bagi mahasiswa tunadaksa), dan tempat khusus yang cukup lapang (bagi mahasiswa autis apabila diperlukan). Apabila hal-hal tersebut tidak terakomodasi, maka pelaksanaan pembelajaran pun menjadi bermasalah.

Penyampaian materi merupakan salah satu bagian penting pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Penyampaian materi dari dosen seharusnya dapat diterima dengan baik oleh MBK dengan atau tanpa melalui pendamping. Namun, akan menjadi masalah apabila penyampaian materi dari dosen tidak diterima oleh MBK karena alasan apa pun. Sesuai dengan siratan dari Soeparman (2017), penyampaian materi harus meniadakan penggunaan kata-kata abstrak tanpa penjelasan, menjelaskan secara lisan terkait materi visual (bagi mahasiswa tunanetra), menyampaikan materi secara pelan dan membiasakan menerima kata-kata yang terbolak balik (bagi mahasiswa Tuli), serta menggunakan kata-kata sederhana.

Interaksi sosial antara mahasiswa berkebutuhan khusus, *volunteer* pendamping, dengan dosen, menjadi hal

yang berpengaruh dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran. Interaksi yang tidak baik akan membuat pelaksanaan pembelajaran menjadi bermasalah.

3. Problematik Pada tahap Evaluasi Pembelajaran

Problematik pada tahap evaluasi pembelajaran MBK Prodi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagai berikut: 1) Ada evaluasi pembelajaran MBK yang tidak dimodifikasi. 2) Evaluasi pembelajaran MBK masih belum berjalan dengan semestinya.

Tahap evaluasi pembelajaran dalam *setting* inklusif memiliki sistem penilaian yang fleksibel dan dimodifikasi dengan catatan mengacu pada kurikulum yang sudah dimodifikasi, berkaitan dengan soal ujian, waktu, teknik, cara, tempat evaluasi, dan lain-lain (Maftuhatin, 2014). Menurut Wibowo (2015), pada evaluasi pembelajaran *setting* inklusif, diperlukan berbagai modifikasi yang inovatif dan kreatif agar semua peserta didik dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran dan mendapatkan hasil yang ideal. Beberapa evaluasi pembelajaran *setting* inklusif dengan modifikasi menurut Wibowo (2015), yaitu ujian mandiri dengan komputer bicara, ujian dengan pendampingan resmi, dan ujian dengan pendampingan bebas.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus (*setting* inklusif) masih memiliki berbagai problematik. Problematik ini tersebar pada tiga tahap pembelajaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, ada dua permasalahan yang muncul, yaitu asesmen MBK yang dilaksanakan selama ini tidak komprehensif dan RPS mahasiswa berkebutuhan khusus tidak

dimodifikasi. Pada tahap pelaksanaan, problematik yang muncul berkaitan dengan implementasi RPS, yaitu pelaksanaan pembelajaran MBK tidak sesuai dengan RPS yang disusun. Problematik lainnya adalah kemampuan volunter pendamping MBK yang belum optimal, ada pembelajaran MBK yang tidak menerapkan setting inklusif, serta media pembelajaran masih belum tersedia secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). *Pelaksanaan sekolah inklusi di indonesia*. Prosiding KS: Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Dixon, S. (2005). Inclusion—Not segregation or integration is where a student with special needs belongs. *The Journal of Educational Thought*.
- Kemenristekdikti. (2017). *Panduan layanan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi*.
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan inklusif & upaya implementasinya*. Jakarta: PT luxima Metro Media.
- Kustawan, D., & Meimulyani, Y. (2016). *Mengenal pendidikan khusus & pendidikan layanan khusus serta implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Maftuhatin, L. (2014). Evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus (abk) di kelas inklusif di sd plus darul ‘ulum jombang. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 201–227.
- Majid, A. (2013). *Strategi pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soeparman, S. (2017). *Pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus*.
- Sudjak, S. (2018). Problematika pendidikan inklusi di sekolah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(2), 185–201.
- Sumarni, T. (2013). *Integrasi pelayanan pembelajaran inklusi di sd negeri sumberrejo*. Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wibowo, H. S. (2015). Metode evaluasi pembelajaran inklusif bagi peserta didik difabel netra. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 2(1), 87–108.
- Yuwono, I. (2015). *Identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus setting pendidikan inklusif*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Yuwono, I., & Utomo, U. (2015). *Pendidikan Inklusif Paradigma Pendidikan Ramah Anak*. Banjarmasin: Pustaka Banua.